

KEAMANAN NASIONAL VS GERAKAN INTELLIGENCE DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh : **Lukman Hakim**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), Jalan Hang Lekir I No 8
Jakarta Pusat 10270, DKI Jakarta, Indonesia

Email: lukmanhakim@dsn.moestopo.ac.id

Abstract

This article is intended to encourage reflection and discussion on civil-military relations and issues of democratic control of the defense and security sectors. National security and human security are the currencies that have a very close linkage to the national interests of policy formulation. Law and legislation not only serves to ensure the performance of the country but should reflect the essential values of justice and humanity.

National security is a dynamic condition of the nation and the Republic of Indonesia which ensures the safety, peace, and well-being of citizens, communities, and nation, protection of sovereignty and territorial integrity of the State, as well as the ongoing national development of all threats.

The formulation of public policies in safeguarding the interests of national public NKRI certainly have to look at the location and geographical and topographical conditions Indonesian archipelago nation of Indonesia as well as the largest diversity throughout the territory of the Republic of Indonesia to confront the strategic environment

and the globalization that is characterized by the progress of science, technology, communication, information, and transportation and negative positive impact on the national interest. Therefore, formulation and policy analysis in realizing stability of national security, national security management must be implemented by all the States and the components of society through a pattern of integrated threat prevention, rapid, accurate, complete, coordinated and synergistic. It will create a national security system that help nation in organizing and empower the national resources in an integrated and focused for the creation of national security.

This paper attempts to describe the condition in Indonesia by looking at the various threats that exist consisting of: 1) the potential for post-cold war conflicts, 2) Post-reform, 3) Democracy, Intelligence and Geopolitics Flash Point, 4) What is the purpose of national security?, 5) Why National Security Concept Important?

Keywords: Concept of national security, intelligence movements, public policy, and community participation

A. Pendahuluan

Dalam konteks Indonesia sekarang ini terutama sejak terjadinya reformasi, ada pemisahan kelembagaan antara TNI dan Polri dalam pengertian tentang keamanan dan pertahanan, dengan dikeluarkannya TAP MPR VI dan VII yang secara kategoris memilah wilayah keamanan dan pertahanan dalam mendefinisikan fungsi dan tugas TNI dan Polri. Polri ditetapkan sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan sementara TNI sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pertahanan.

Padahal keamanan dan pertahanan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam menjaga kedaulatan negara (eksistensi negara, sosial, politik, ekonomi, budaya), ideologi negara (Pancasila), Bhinneka Tunggal Ika (keberagaman suku bangsa, etnik dan bahasa menjadi Indonesia).

Pemahaman bangsa Indonesia atas konsep Keamanan sebenarnya sejak awal mengenali adanya keterkaitan antara aspek kehidupan yang tidak hanya didominasi aspek militer (dalam pengertian pertahanan). Namun sejak bergulirnya reformasi otoritarian menjadi penyebab pemisahan antara keamanan dan pertahanan, yang tanpa disadari menjadikannya reformasi kehilangan arah kebangsaan dan kenegaraan dengan menipisnya kedaulatan negara, Ideologi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi gelombang globalisasi yang semakin tak terbendung. Ketika masyarakat internasional bergerak ke arah pemahaman yang lebih luas, kita malah bergerak mundur dari cara pandang kita sendiri yang sudah komprehensif.

Maka sudah saatnya kita dudukkan kembali pemahaman maupun definisi keamanan dan pertahanan pada porsi awal yang sebenarnya yang menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Mempertahankan keutuhan wilayah dan menjaga

kedaulatan Pemerintah merupakan persoalan penting, namun sama pentingnya bahkan lebih penting adalah melindungi keselamatan, memberi peluang pengembangan identitas dan menyediakan prasarana kesejahteraan kepada warganegara/masyarakat/rakyatnya, sehingga terjadi totalitas mengenai kemampuan negara untuk melindungi apa yang ditetapkan sebagai nilai-nilai inti (Kedaulatan negara, Ideologi Negara, Bhinneka Tunggal Ika), yang pencapaiannya merupakan sebuah proses terus-menerus, dengan menggunakan segala elemen power dan sumber daya yang ada serta melingkupi semua aspek kehidupan.

Pemahaman komprehensif demikian tersebut akan membantu unsur-unsur negara dalam menempatkan kebijakan keamanan nasional sebagai payung bersama dalam setiap merumuskan berbagai strategi manajemen ancaman yang terkoordinasi, baik dari dalam maupun dari luar, sehingga tercipta sinergisitas secara nasional dalam menyelesaikan berbagai problem yang terus melanda Indonesia sebagai bangsa dan negara.

B. Potensi Konflik Pasca Perang Dingin

Pasca perang dingin, interaksi di antara negara-negara besar tidak lagi dipengaruhi secara kuat oleh pertarungan “ideologi secara nyata” namun bergeser pada pertarungan “perebutan akses ekonomi”. Kepentingan nasional negara-negara besar lebih berorientasi upaya menjaga kestabilan ekonomi yang ditopang oleh kekuatan politik dan militer. Dengan kenyataan demikianlah konflik yang potensial terjadi adalah konflik-konflik berdimensi ekonomi, seperti halnya konflik perebutan sumber daya alam ataupun konflik upaya pengamanan jalur transportasi perdagangan internasional bagi kepentingan negara-negara besar.

Upaya negara-negara besar mengamankan pasokan energinya, menyeret Indonesia yang letaknya sangat strategis dengan berbagai potensi sumber daya alam yang begitu kaya kedalam konflik antar negara-negara besar sehingga berimplikasi pada terjadinya konflik horizontal dan vertikal diantara warganegara maupun elit-elitnya dalam menjaga kedaulatan negara, ideologi negara dan bhinneka tunggal ika sebagai pilar utama pemersatu bangsa dan negara.

Persoalan lain yang juga mengemuka di tingkat regional adalah Terorisme, hal itu juga yang di landa negara seperti Indonesia, yang seolah-olah terorisme hanya persoalan agama khususnya Islam. Padahal terorisme itu muncul akibat kebijakan Negara (Eksekutif, Legislatif Yudikatif) yang menciptakan ketidakadilan dan ketidaksejahteraan disegala dimensi kehidupan sehingga melahirkan kemiskinan dan kebodohan warganegara/masyarakat/rakyatnya dari pertarungan-pertarungan ekonomi negara-negara besar dalam mengeksploitasi negara-negara kaya, yang tak rela melepaskan negara-negara kaya yang dulunya wilayah kolonial mereka.

Oleh karena itu persoalan-persoalan yang muncul sebagai potensi ancaman yang terjadi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika lingkungan strategis yang terjadi di 3 ranah, yaitu global, regional dan domestik.

C. Pasca Reformasi

Perubahan besar yang terjadi di tahun 1997/1998 yang tidak terkonsolidasi maka membawa dampak wajah euforia kebebasan yang melahirkan potensi-potensi konflik dalam berbangsa dan bernegara.

Kegagalan reformasi, "hanya dapat mendudukkan tentara (TNI) masuk ke barak dengan dibawah supremasi sipil (MENHAN)",tetapi tidak mampu merubah kemampuan Negara yang

diharapkan menjadi GOOD GEVERNANCE.

Ketidakmampuan tersebut sangat terlihat dengan tidak berdayanya birokrasi sebagai mesin pemerintah dalam memberikan pelayanan-pelayanan dan solusi-solusi publik, maka muncul ketidakpuasan publik lalu dijawab dengan kegagalan reformasi (euforia), terpisahnya pemahaman pertahanan dengan keamanan yang berakibat cara berfikir dan tindakan yang tidak tepat bahkan salah. Hal tersebut tidaklah berdiam dalam mencari solusi melainkan diperparah dengan fenomena reformasi kebebasan berpolitik (euforia).

Langkah reformasi telah mengubah sistem pemerintahan erasebelumnya dengandilahirkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, lalu di perbaharui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi seluas-luasnya) ini. Euforia politik sebagai hasil pemilu tahun 1999 telah memberikan kerangka dasar awal dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, yang lebih banyak dipengaruhi kekuatan politik dalam penyelenggaraannya. Beberapa indikator yang mewarnai penyelenggaraan sistem pemerintahan di era ini antara lain:

1. Kekuasaan Legislatif lebih besar dibanding kekuasaan eksekutif
2. Pemerintahan dikendalikan oleh kekuasaan politik
3. Pertanggungjawaban kepala daerah kepada lembaga legislatif
4. Kepala daerah dapat diberhentikan oleh DPRD
5. Wewenang DPRD menetapkan belanja DPRD
6. Menjamurnya pemekaran daerah kabupaten / kota.

Perkembangan atas nama demokrasi (euforia) yang terus bergulir tanpa terkendali inilah yang mengakibatkan potensi-potensi konflik besar

dan kecil terus mengemuka dan silih berganti, otonomi daerah bergerak bukan berdasarkan prinsip-prinsip bernegara melainkan atas kehedak kepentingan politik kekuasaan pragmatisme bahkan transaksional.

Oleh karena itu Reformasi tetap harus berjalan dengan cita-cita dan tujuannya dalam menjawab dinamika berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi di 3 ranah, global, regional dan domestic.

D. Demokrasi, Intelligence dan Geopolitik Flash Point

Keamanan nasional dapat berhasil maksimal, jika berdasarkan atas pengetahuan Geopolitik "(Soekarno)". Dengan memahami kondisi geopolitik suatu negara, dapat ditentukan arah kebijakan keamanan nasional dan kebijakan politik luar negeri serta perdagangan luar negeri (free trade) dalam kerangka keamanan nasional.

Wilayah yang mengandung sumber daya alam yang kaya seperti minyak, gas bumi, mineral maupun hutan, dll, di lingkup domestik maupun internasional dapat menciptakan instabilitas politik suatu negara seperti Indonesia yang begitu sangat kaya. Oleh karena itu demokrasi dalam perspektif konsep keamanan nasional (Indonesia) berangkat dari pemahaman geopolitik dan sumber daya alam yang kaya didalamnya (GEOPOLITIK FLASH POINT).

Konsep geopolitik Indonesia ialah wawasan nusantara, jadi geopolitical flash point di wawasan nusantara berada di aceh, riau, Palembang, Kalimantan timur, Kalimantan barat, Jawa timur, Sulawesi tenggara, seram, Irian Jaya, Laut Natuna, Laut Jawa, Selat Makasar dan mungkin masih banyak lagi. Sedangkan kategori strategic sea lanes berada di selat Malaka, selat Sunda dan selat Lombok.

Berdasarkan konsep tersebut diatas bahwa

demokrasi dan konsep keamanan nasional harus menjadi satu kesatuan integral dalam menjaga kedaulatan, ideologi, bhinneka tunggal Ika NKRI. Jangan sampai demokrasi hanya dijadikan sandra demi kepentingan pragmatis bahkan transaksional kelompok-kelompok tertentu maupun asing untuk menguras kekayaan alam Indonesia yang begitu kaya. Sadar atau tidak sadar itu telah terjadi dalam proses berbangsa dan bernegara, satu persatu wilayah kedaulatan Indonesia telah hilang menjadi wilayah negara lain seperti pulau Irian dan sepadan yang mengandung kekayaan alam didalamnya belum lagi blok Ambalat yang masih bersengketa dan beberapa wilayah pulau terdepan Indonesia yang masih dalam sengketa dan bisa mungkin pulau-pulau lainnya juga akan di klaim menjadi wilayah negara lain, mengingat pertahanan Indonesia dalam kerangka keamanan nasional semakin melemah dan kabur karena adanya perubahan politik yang tidak menentu dalam proses demokrasi, termasuk pemisahan keamanan dan pertahanan dalam rangka proses demokrasi yang tanpa arah dan tujuan.

Banyak pihak kemudian menyadari bahwa kekuatan sebenarnya yang bekerja paling efektif melindungi kepentingan USA adalah CIA sebagai perangkat keamanan nasional. Begitu pula serta kehancuran USSR menjadi pecah beberapa negara tidak lain adalah kegagalan KGB sebagai perangkat keamanan nasional dalam melindungi kepentingan negaranya (USSR).

Apapun keluarannya, sejarah akan mencatat pula bahwa intelligence tetap memainkan peran yang sangat vital dalam penyusunan kebijakan nasional suatu negara.

Perubahan demokratisasi Indonesia berlangsung demikian cepat dan penuh ketidak pastian yang tinggi. Disinilah sejauhmana peranan intelligence mendorong proses demokratisasi Indonesia berjalan sesuai dengan kepentingan

berbangsa dan bernegara dengan menjaga kelangsungan kedaulatan, Ideologi, Bhinneka Tunggal Ika NKRI. Tetapi dengan kaburnya atau ketidakmampuan Negara terhadap kebijakan konsep Keamanan nasional bagaimana mungkin system keamanan nasional bisa bergerak dalam melindungi kepentingan public nasional, sebagaimana intelligence sebagai perangkat keamanan nasional

Tidak bisa dipungkiri bahwa era reformasi, menguatnya tuntutan penengakan HAM, menguatnya supremasi hukum, tuntutan pemekaran wilayah otonom maka mesin intelligence perlu menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya.

Setiap negara mempunyai mesin intelligence dengan berbagai plus minus, dan kepada mesin itulah diberikan beban untuk mengindra berbagai **POTENSI** sampai **ANCAMAN**, mulai dari tahap **GENESIS** sampai pada **IMMINENT ATTACK**.

Sejarah intelligence Indonesia pernah berada pada tataran yang kuat, namun sejarah mencatat pula bahwa kekuatan tersebut secara sistematis di hancurkan. Pertanyaannya mengapa demikian?....., banyak pihak mengetahui dengan benar bahwa "knowledge is power", siapa pegang knowledge (intelligence) maka dialah yang pegang kendali kekuasaan. Apabila demikian maka intelligence harus di gembosi agar tidak ada pihak yang dapat memanfaatkannya melalui pemisahan keamanan dan pertahanan sehingga menjadi kabur dalam penanganan kepentingan nasional.

Demokrasi memang mendorong proses pembangunan dengan berbasis partisipasi rakyat agar mencapai suatu keadilan dan kesejahteraannya, karena tidak ada keran-keran yang tertutup, tetapi kesadaran yang begitu cepat dalam berdemokrasi melampaui kemampuan dan kesadarannya bukankah itu menjadi pertanyaan apakah betul itu dilahirkan dari pikiran dan kehendak warganegara

akan berdemokrasi atau ada kepentingan asing yang mensponsori dalam menguasai wilayah-wilayah yang kaya sumber daya sehingga seperti yang kita lihat sekarang demokrasi berjalan menuju anarkis demokrasi yang melahirkan industri demokrasi.

Demokrasi juga tanpa di sadari oleh unsur-unsur negara termasuk elit politik terhadap keamanan nasional dalam menjalankan kepentingan nasional, intelligence yang seharusnya telah bergerak dalam rangka protektif terhadap kepentingan nasional menjadi kabur, misalnya kasus blok ambalat yang dulunya tidak pernah mengemuka jadi persoalan persengketaan sekarang menjadi konflik persengketaan, ini juga menjadi pertanyaan apakah betul blok ambalat itu ada persengketaan batas wilayah negara atau ada kepentingan asing yang harus ditelusuri oleh intelligence dalam kerangka keamanan nasional yang masuk untuk memunculkan persengketaan karena blok ambalat mengandung sumber daya alam yang kaya

Berangkat dari semua itu di atas, maka demokrasi Indonesia harus di landasi dengan kesadaran nasionalisme dalam menjaga kedaulatan, Ideologi, Bhinneka Tunggal Ika NKRI, karena sesungguhnya pun demokrasi bukanlah hal yang mutlak apabila mengancam keutuhan suatu negara. Tidak ada satu negara pun di dunia yang mau keutuhannya hancur dalam melindungi demokrasi yang tanpa arah dan tujuan.

E. Apa yang di maksud keamanan nasional ?

Keamanan Nasional (*National Security*) merujuk pada kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, politik, militer, social dan budaya serta pengembangan diplomasi. Secara konvensional, tafsir konsep Keamanan Nasional

menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara tersebut.

Beberapa langkah yang penting untuk memastikan keamanan nasional :

1. Penggunaan diplomasi untuk menggalang sekutu dan mengisolasi ancaman
2. Penataan Angkatan Bersenjata beserta Polri yang efektif dengan berbasis kemandirian sehingga dapat menekan ketergantungan kepada asing
3. Implementasi konsep pertahanan yang bersifat sipil dan kesiagaan dalam menghadapi situasi darurat, termasuk terorisme baik (politik, ekonomi, sosial dan budaya).
4. Memastikan daya dukung dan ketersediaan infrastruktur dalam negeri yang penting disegala sector pembangunan.
5. Penggunaan kekuatan intelijen untuk mendeteksi dan mengalahkan atau menghindari berbagai ancaman dan spionase, serta melindungi informasi rahasia
6. Penggunaan kekuatan kontra-intelijen untuk melindungi rakyat dan Negara.

Setelah berakhirnya era Perang Dingin, perkembangan ilmu Administrasi Negara dengan kebijakan public serta hubungan internasional melahirkan pandangan baru konsep keamanan dalam menjawab dinamika negara-negara dan dunia global dalam menjaga kepentingan rakyat dan negaranya yang tidak hanya meliputi aspek militer dan pelibatan aktor keamanan semata-mata. Menurut para pakar konsep keamanan non-konvensional ini memiliki definisi yang lebih fleksibel dan luas meliputi aspek non-militer dan melibatkan aktor-aktor non-insititusi pemerintah.

Oleh karena itu PBB menekankan bahwa keamanan nasional bukan saja menitikberatkan negara melalui kekuatan militer melainkan lebih

fleksibel dan luas yaitu konsep keamanan secara menyeluruh, yang memiliki empat dimensi: (1) dimensi pertahanan negara, (2) dimensi stabilitas dalam negeri, (3) dimensi ketertiban publik, dan (4) dimensi keamanan insani. Tetapi itu tidaklah cukup mengingat Indonesia begitu luas geografisnya tersebar dengan kepulauan yang mempunyai potensi alam yang kaya, maka penambahan berupa a) dimensi bencana, karena setiap peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam maupun manusia yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, b) dimensi keamanan ke luar, merupakan kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa NKRI dari ancaman luar negeri dalam rangka terciptanya keamanan nasional, c) dimensi intelligence, merupakan pengetahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait perumusan dan analisa kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui method kerja untuk mendeteksi dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

F. Mengapa Konsep Keamanan Nasional Penting?

Dengan berakhirnya perang dingin dan menguatnya berbagai isu-isu non militer seperti, kemiskinan, hak asasi manusia (HAM), ketersediaan pangan, energi, korupsi, terorisme, narkoba, dll, maka pengertian keamanan mengalami perubahan. Barry Buzan menyebutkan ada lima 5 sektor keamanan, yaitu, sektor militer (*military security*), sektor politik (*political security*), sektor ekonomi (*economic security*), sektor sosial (*societal*

security) dan sektor lingkungan (*environmental security*). Dimana dalam prakteknya ke lima sektor tersebut saling bersinggungan satu sama lainnya. Menurut Buzan:

"The security of human collectivities is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal and environmental. ..., military security concerns the two level interplay of the armed offensive and defensive capabilities of states, and states' perception of each other's intentions. Political security concerns the organizational stability of states, systems of government and the ideologies that give them legitimacy. Economic security concerns access to the resources, finance and markets necessary to sustain acceptable levels of welfare and state power. Societal security concerns the sustainability, within acceptable conditions for evolution, of traditional patterns of language, culture and religious and national identity and custom. Environmental security concerns the maintenance of the local and the planetary biosphere as the essential support system on which all other human enterprises depend. These five sectors do not operate in isolation from each other. Each defines a focal point within the security problematique, and a way of ordering priorities, but all are woven together in a strong web of linkages."

Merujuk pada PBB yang menekankan konsep dan fokus keamanan dari keamanan yang menitikberatkan kepada keamanan negara menjadi keamanan masyarakat, dari keamanan melalui kekuatan militer menuju keamanan melalui pembangunan masyarakat, dari keamanan wilayah kepada keamanan manusia terkait jaminan keamanan, pangan, pekerjaan dan lingkungan. Oleh karenanya, keamanan nasional merupakan perwujudan konsep keamanan secara menyeluruh, yang memiliki empat dimensi: (1)

dimensi pertahanan negara, (2) dimensi stabilitas dalam negeri, (3) dimensi ketertiban publik, dan (4) dimensi keamanan insani. konsep keamanan insani (*human security*) dimengerti sebagai bebas dari ketakutan (*freedom from fear*) dan bebas dari kebutuhan (*freedom from want*). Konsep ini meliputi; 1) Keamanan Ekonomi (*economic security*), 2) Keamanan Pangan (*food security*), 3) Keamanan Kesehatan (*health security*), 4) Keamanan Lingkungan (*enviromental Security*), 5) Keamanan Individu (*personal security*), 6) Keamanan Komunitas (*community security*), dan 7) Keamanan Politik (*political security*).

Secara konstitusional, Keamanan Nasional ditujukan untuk mencapai Tujuan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia."

Kasus konflik Selat Malaka misalnya, fungsi strategis Selat Malaka tersebut dapat mengundang negara-negara besar untuk melakukan intervensi jika keamanan laut di wilayah tersebut terganggu, yang dapat membuka konflik dengan Indonesia yang berusaha mempertahankan kedaulatannya di Selat Malaka. Apalagi AS dan Jepang berkeinginan terlibat dalam pengaturan keamanan jalur tersebut maka memungkinkan RRC untuk melibatkan diri dan sepenuhnya menimbulkan konflik regional yang berdampak khususnya Indonesia. keterlibat itu pernah dilontarkan AS dan Jepang yang berkeinginan terlibat dalam pengaturan keamanan jalur laut di Selat Malaka untuk mengantisipasi ancaman perompakan di Selat Malaka, tentu hal tersebut harus bisa di jawab dengan konsep keamanan nasional dalam kepentingan dan kedaulatan NKRI

Berangkat dari hal tersebut pula bangsa dan negara ini diserang berbagai masalah seperti misalnya sadarkah elit, politikus maupun

pemimpin negara terhadap keberadaan virus yang berkembang di masyarakat seperti H5N1 dan H1N1, apakah mungkin ini hanya sekedar virus semata yang melanda Indonesia atau ada senjata biologis maupun kepentingan ekonomi asing ? dan sejauhmanakah keuntungan Indonesia terhadap virus-virus tersebut yang dikarenakan Indonesia yang mempunyai virus-virus tersebut ?

Selain virus ada juga penjualan saham Krakatau Steel demi meningkatkan kekuatan perusahaan negara ?, yang artinya ada kontradiktif pengembangan BUMN dalam mendorong ekonomi nasional kalau sahamnya dimiliki asing dalam mengontrol kekuatan ekonomi nasional, “Soekarno” pernah mengatakan 3 motherfactory sebagai kekuatan industri menjadi negara besar, 1. Industri baja dan besi, 2. Industri listrik, 3. Industri pendidikan, harus dimiliki negara untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Itulah sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan konsep keamanan nasional

Ataukah juga kenapa sampai sekarang Pertamina dengan kementerian BUMN bersama kementerian ESDM tidak pernah membangun kilang minyak dikarenakan memakan biaya tinggi yang tidak sebanding dengan keuntungan ? sedangkan Indonesia negara kaya minyak belum lagi cadangannya dibandingkan Singapura yang negara kota yang tidak mempunyai minyak tapi punya kilang minyak, itulah sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan konsep keamanan nasional

Masalah internasional lainnya yang berpengaruh pada Indonesia adalah praktik pencucian uang, apalagi Asia ditenggarai merupakan “surga” bagi praktik-praktik pencucian uang. Maraknya praktik korupsi, kolusi dan penyelundupan memberikan kemungkinan yang besar bagi terjadinya praktik pencucian uang di Indonesia dan negara Singapura tempatnya surga bagi pelarian-

pelarian korupsi ?. Salah satu contoh kasus yang dapat diberikan adalah kasus Adelin Lis yang dicurigai terkait dengan praktik pencucian uang ?. Di dalam kasus ini Lis dicurigai melakukan praktik pencucian uang hasil hutan. Belum lagi kasus BLBI yang merampok uang negara ratusan triliun rupiah sampai kasus Century Triliunan rupiah, siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang diuntungkan dan tentunya negara dan rakyatlah yang paling sangat dirugikan. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang berpotensi sampai ancaman yang harus dijawab dengan konsep keamanan nasional.

G. Kesimpulan

Oleh karena itu konsep keamanan nasional menjadi penting untuk diperhatikan karena ia tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), aturan hukum (*Rule of Law*) dan pengawasan yang seimbang (*check and balances*). Penekanan ini penting mengingat bahwa kepentingan keamanan nasional bisa memunculkan eksese politik dan sosial yang tidak diharapkan publik. Karenanya untuk tindakan-tindakan tertentu terkait kepentingan keamanan nasional seperti pengawasan terhadap kehidupan publik dan sensor media mensyaratkan satu keputusan politik yang bisa diterima publik secara konstitusional.

Mempertimbangkan semua itu bahwa konsep keamanan nasional untuk mendeteksi dini bahwa setiap individu serta suatu entitas sosial (masyarakat maupun politik negara) dalam menghadapi spektrum dari potensi sampai ancaman yang luas, mulai dari yang bersifat fisik sampai non fisik.

Pertimbangan historis, geografis, geopolitik, ideologis dan perkembangan politik kontemporer harus dimasukkan dalam perumusan konsep keamanan nasional. Gravitasi hubungan antar

negara pada dinamika ekonomi tidak sepenuhnya menghapus relevansi konteks politik geostrategi. Bagi sebuah negara kepulauan, termasuk Indonesia, melindungi keamanan nasional adalah usaha besar untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan maritim berikut sumberdaya yang berada di dalamnya. Keamanan jalur pelayaran (*sea line of communication*), kedaulatan atas kawasan ekonomi eksklusif, dan kedaulatan atas sumberdaya maritim menjadi sama pentingnya dengan *resources* yang berada di daratan.

Dengan rentang ancaman yang luas pula, sebagaimana telah dijelaskan, Indonesia membutuhkan sebuah sistem keamanan terpadu

yang tidak saja sanggup mengatasi ancaman militer namun juga sanggup mengatasi ancaman-ancaman non-militer yang cakupannya sangat luas. Dengan rentang ancaman yang sedemikian luas maka aktor keamanan yang bertugas mengatasi ancaman juga meluas tidak lagi terbatas pada aktor militer semata, sebagaimana yang terjadi selama ini. Untuk menghadirkan sistem keamanan tersebut dibutuhkan sebuah regulasi payung yang dapat menjadi acuan bagi regulasi-regulasi dibawahnya, yang mengatur masalah-masalah keamanan secara lebih spesifik dan terkoordinasi sehingga terciptanya sinergisitas.

Daftar Pustaka

- Mufti Makaarim & S Yunanto (eds.), *Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998 – 2006*, IDSPS, 2008
- Anak Agung Banyu Perwita (eds), *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, 2006, Propatria
- T Hari Prihartono (eds), *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*.
- Kusnanto Anggoro dan A.A Banyu Perwita (eds), *Rekam Jejak Proses 'SSR di Indonesia 2005-2005*, 2006, Propatria
- Prof. Dr. Sondang P. Siangian, M.P.A. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*
- Suwarno dan Alvin Y. SO. *Perubahan Sosial dan Pembangunan (Edisi revisi)* LP3ES
- Arief Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan (kumpulan tulisan 1965-205)*, Freedom Institut dan Pustaka Alvabet.=